

## BAB VI

### KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI

#### 1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pendidikan senantiasa berorientasi ke masa depan. Semakin jelas dan rinci pemahaman tentang masa depan pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan akan semakin terbuka peluang bagi aparat pendidikan untuk dapat melakukan perubahan pengelolaan pendidikan ke arah yang lebih baik. Pemahaman yang sesksama dan sikap yang mendukung terhadap perubahan/perkembangan dalam penyelenggaraan pendidikan (wajar) akan mampu melahirkan bentuk-bentuk kreativitas baru dalam berpartisipasi menjawab tantangan dan permasalahan penyelenggaraan pendidikan.
2. Dalam Penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP, secara kuantitas harus mampu menjangkau

seluruh anak usia wajar di seluruh pelosok tanah air (makna pemerataan; equity dan equality), sedangkan secara kualitas wajar harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan dasar sebagai bekal untuk mengembangkan kehidupannya dalam hidup bermasyarakat, maupun untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi

3. Dicanangkannya wajar pendidikan dasar tingkat SLTP (wajar 9 tahun) pada dasarnya adalah merupakan perubahan dalam sistem pengelolaan pendidikan menuju kearah yang lebih baik. Perubahan ini hendaknya berorientasi kepada manusianya sebagai unsur pelaksana pendidikan, yaitu dengan berupaya mengetahui bagaimana persepsi, sikap dan partisipasi para pengelolanya.
4. Realisasi penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP telah diatur oleh Undang-undang Sistem Pendidikan dan Kebijakan-kebijakan lainnya yang sudah terpolakan secara nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang harus diatasi baik yang menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru yang muncul sebagai akibat dari adanya perubahan (seperti adanya target tertentu dalam menuntaskan wajar).

5. Untuk mencapai target penuntasan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP perlu upaya-upaya preventif yang berorientasi kepada pemahaman dan kemampuan para pelaksana pendidikan di lapangan. Melalui upaya ini akan diketahui apakah program wajar tersebut dapat terealisasi dengan baik atau sebaliknya.
6. Keputusan untuk melaksanakan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP adalah merupakan keputusan strategis sebagai pernyataan awal dari betapa pentingnya faktor sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa. Realisasi dari keputusan tersebut adalah :
- Perubahan dalam pengelolaan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik, tanggap terhadap tuntutan perkembangan kebutuhan pendidikan masyarakat.
  - Sadar akan tugas dan perannya sebagai pengelola pendidikan untuk terus berusaha memberikan pelayanannya yang terbaik (bermutu).
  - Dapat mengemban misi pendidikan (wajar) yang secara dinamis mampu mengimbangi perkembangan kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.
7. Dicanangkannya wajar pendidikan dasar tingkat SLTP

adalah wujud dari keberhasilan kerja para pengelola pendidikan dalam pelaksanaan wajar sebelumnya. "*Proses manajemen ditentukan oleh pimpinan*" (Mohammad Fakry Gaffar; 1994; 26), dalam merekayasa dan memadukan unsur-unsur pendidikan menjadi suatu sistem yang dapat berperan secara efektif dalam organisasi pendidikan.

8. Dilihat dari dimensi tujuan, hasil wajar pendidikan dasar tingkat SLTP diharapkan para peserta didik :

- mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup (survive) dalam keadaan apapun.
- mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, dan
- mempunyai kemampuan untuk berkembang dan belajar lebih lanjut.

9. Penanganan pendidikan tidak bisa dilakukan secara teknis administratif belaka, tetapi harus dikendalikan secara kreatif dan inovatif oleh tenaga-tenaga pendidikan yang mempunyai keyakinan dan sikap tertentu, bertanggung jawab, serta mampu merealisasikan misi pendidikan menjadi satu bentuk kegiatan/ partisipasi aktif pengelolaan pendidikan.

10. Deskripsi persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta di Kotamadya Bandung yang mencerminkan keterbukaan dan kesiapan terhadap penyelenggaraan wajar adalah merupakan wujud kepekaan dan keterlibatan mereka dalam upaya pencapaian tujuan organisasi pendidikan.
  
11. Persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta di Kotamadya Bandung telah menunjukkan respon yang baik terhadap penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP. Kondisi ini telah mencerminkan kerjasama kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang sekaligus merupakan salah satu indikator profesionalisasi pengelolaan wajar (pendidikan).
  
12. Banyak hambatan dalam penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP walaupun peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya telah terpolakan secara nasional. Pemerintah, keluarga dan masyarakat telah terlibat di dalamnya. Kesulitan atau kendala lain akan bertambah manakala para pengelola pendidikan tidak mampu menterjemahkan peraturan dan kebijakan tersebut, memberi makna yang tepat, serta menempatkannya pada

tingkat sekolah (satuan pendidikan), untuk mendorong peserta didik belajar dan menciptakan suasana atau hubungan kerja yang harmonis antar rekan/sejawat.

13. Deskripsi persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta di Kotamadya Bandung menggambarkan bahwa program wajar pendidikan dasar tingkat SLTP telah menjadi keyakinan dan sikap masyarakat (pengelola pendidikan) sebagai program yang rasional dan adaptif. *"Peranan persepsi seseorang sangat penting dalam suatu organisasi (Program Akta Mengajar V; IIC; 1982/1983; 22).*

14. Temuan penelitian yang menggambarkan keterkaitan langsung maupun tidak langsung diantara variabel yang diteliti menggambarkan bahwa, partisipasi pengelola pendidikan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya adalah merupakan fungsi dari persepsi (bagaimana ia memaknai wajar) dan sikap (bagaimana menilainya), sehingga apa yang dikerjakan mereka adalah merupakan hasil dari kesadaran dan sikapnya.

15. Partisipasi yang dilakukan dengan baik membawa pengaruh positif terhadap perubahan suatu sistem,

karena orang-orang yang ada di dalamnya merasa lebih terlibat dan lebih dihormati, dapat menambah kepercayaan diri, sehingga dapat memanfaatkan seluruh kreativitasnya untuk menjadi pegawai yang bertanggung jawab.

16. Persepsi, sikap dan partisipasi para pengelola pendidikan secara signifikan tidak berbeda (sama) dilihat dari latar belakang pendidikan pengelola dan status akreditasi sekolah yang dikelolanya. Kondisi ini sangat menunjang kelancaran pencapaian target dan tujuan wajar. Hal ini dapat dipahami karena keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kontribusi para pelaksananya.

17. Secara administratif penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP di Kotamadya Bandung telah terselenggara dengan baik, karena dilaksanakan menurut pedoman dan kebijakan pemerintah yang sudah terpolakan. Kehadiran program wajar telah dapat menggugah kepedulian serta keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam fungsinya masing-masing, sebagai pengelola pendidikan, orang tua dan sebagai penyandang dana/fasilitas pendidikan lainnya untuk kelancaran



peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan.

18. Upaya strategis penyelenggaraan wajar pendidikan dasar sebagai program pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama, dalam realisasinya telah mendapat respon yang baik dari para pengelola pendidikan swasta di Kotamadya Bandung. Hal ini merupakan peluang yang baik dalam upaya mengoptimalkan sumber daya pendidikan.

19. Kelebihan dan kelemahan unsur-unsur pendidikan (sumber daya manusia), struktur organisasi sekolah, ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan lainnya, akan mewarnai kebijakan dan strategi penyelenggaraan pendidikan. Adalah merupakan tantangan dan tugas para penyelenggara pendidikan pada tingkat sekolah untuk merekayasa dan mengembangkan ide-idenya secara kreatif dan adaptif, sehingga tiap sekolah dapat mengembangkan lembaganya masing-masing (desentralisasi), dengan tetap berpegang kepada kebijaksanaan/pola operasional pendidikan nasional.

20. Dalam menghadapi perubahan atau kelangsungan masa depan pendidikan yang semakin kompleks, menyiratkan



bahwa pola-pola perilaku lama yang telah menjadi kebiasaan kerja para pengelola pendidikan, tidak sepenuhnya dapat adaptif. Cepatnya suatu perubahan kehidupan masa depan pendidikan kadang kadang membuat para pengelola pendidikan menjadi bingung. Kondisi semacam ini akan memperparah keadaan, manakala para pengelola pendidikan sebagai pelaksana di lapangan tidak mampu memahami dan menyikapi perubahan, mereka kehilangan kreativitas, menjadi cepat putus asa dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Akibatnya mereka akan mencari jalan pintas yang aman bagi diri dan kedudukannya dengan cara siap menerima perintah dari atasan. Mereka hanya berperan sebagai pelaksana keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan fungsi dan peran sebagai pengelola pendidikan, dan perubahan yang membawa harapan baik itupun tidak pernah terjadi.

21. Wajar pendidikan dasar tingkat SLTP yang merupakan perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan, adalah konsekwensi dari kemajuan pembangunan yang berdampak pada perubahan kebutuhan pendidikan masyarakat. Melalui sistem pengelolaan pendidikan yang sudah terpolakan secara nasional, diharapkan para pengelola

pendidikan mampu melayani perubahan tersebut.

22. Berkebangnya tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap dunia pendidikan yang memunculkan pandangan/opini umum seolah-olah semua masalah atau beban pendidikan harus ditanggung oleh sekolah, akan menuntut pemahaman, sikap dan kontribusi pengelola pendidikan dalam mengenali masalah serta memberdayakan potensi dan kepedulian masyarakat menjadi suatu sumber daya pendidikan.
23. Adanya kecenderungan semakin menguatnya keinginan anggota masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan anggota masyarakat lainnya (seperti orang tua asuh, pengusaha) terhadap dunia pendidikan, adalah merupakan salah satu indikator bahwa wajar pendidikan dasar telah menjadi kebutuhan masyarakat. Adalah sangat tepat waktunya pemerintah mencanangkan program wajar 9 tahun disaat masyarakat membutuhkan kehadirannya.
24. Banyak masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan administrasi pendidikan (manajemen sekolah) tidak responsif lagi terhadap

tuntutan perubahan pendidikan masyarakat. Penyebab utamanya karena unsur manusia didalamnya tidak mampu lagi menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan perubahan tersebut pada tingkat sekolah. Kenyataan semacam ini bisa dipahami, karena kedudukan atau jabatan seorang pengelola pendidikan (kepala sekolah maupun ketua yayasan) tidak pernah dipersiapkan secara khusus. Mereka menduduki jabatan itu hanya karena kepangkatan atau pengalaman kerja. Bahkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah-sekolah swasta) jabatan ini sering ditempati oleh orang yang sama sekali tidak mengerti masalah pendidikan, masih bersifat familier, dan alasan-alasan keuangan lainnya.

25. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk bekerjasama sebagai mitra kerja pemerintah. Kerjasama ini dilakukan karena alasan-alasan yang bersumber pada keterbatasan dana. Akibatnya tidaklah heran jika kedudukan sebagai pimpinan lembaga satuan pendidikan yang mempunyai peran sangat menentukan itu bisa ditempati oleh siapa saja yang berminat. Pada sekolah-sekolah swasta kedudukan ini cenderung untuk

ditempati oleh siapa saja yang mempunyai kelebihan persediaan dana. Keragaman latar belakang pendidikan para pengelola juga status akreditasi sekolah yang dikelolanya dapat menyebabkan rendahnya kualitas (out-put) pendidikan sekolah-sekolah swasta dibanding sekolah negeri.

26. Unsur sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan dalam kedudukannya sebagai pimpinan lembaga satuan pendidikan merupakan unsur yang mempunyai peran menentukan. Keberhasilan organisasi akan banyak tergantung kepada seberapa besar kontribusi yang mereka berikan dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih lagi bagi pimpinan lembaga pendidikan swasta yang dihadapkan pada era persaingan yang semakin ketat, menuntut keteraturan serta dinamisasi pelayanan pendidikan.

27. Pendidikan menempati peran paling penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia dalam berbagai kehidupannya. Melalui pelayanan pendidikan yang baik/ bermutu kualitas dan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Semua itu pada akhirnya akan bermuara pada kualitas dan partisipasi sumber daya manusianya.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pendidikan menempati peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai segi kehidupan. Melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu kualitas manusia juga kualitas kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Keadaan ini harus dicermati para praktisi pendidikan dalam upaya perbaikan pelayanan pendidikan.
2. Dicanangkannya wajar pendidikan dasar tingkat SLTP telah membawa pesan perubahan atau perbaikan kualitas pelayanan dan kualitas pendidikan, karenanya menjadi sangat penting untuk membina dan mengembangkan unsur manusia sebagai pengelola pendidikan.
3. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi paling besar pengaruhnya terhadap variabel partisipasi. Maka upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (khususnya pengelola pendidikan) hendaknya lebih diutamakan kearah itu.

4. Wajar sebagai program pemerintah yang menghendaki dukungan keluarga dan masyarakat, hendaknya didukung oleh kemampuan dalam pelaksanaannya. Ketersediaan sarana, teknologi dan sistem informasi pendidikan yang memadai sangat menunjang kearah itu.
5. Kesiapan dan keterbukaan para pengelola pendidikan dalam menerima perubahan sistem pendidikan harus terus dibina dan dikembangkan secara efektif dan efisien dalam upaya mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia.
6. Salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional adalah efisiensi dalam pengelolaan. Efisiensi ini hendaknya tidak hanya diukur dari segi biaya yang dikeluarkan, tetapi juga dari efektivitas dan produktivitas kerja para pengelolanya.
7. Keterlibatan masyarakat (swasta) dalam dunia pendidikan yang sudah sejak lama terbina, hendaknya lebih diupayakan/dicarikan lagi wujud implementasinya. Peran kehadiran mereka hendaknya tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi diperluas dan

dikembangkan kearah pemasyarakatan gerakan orang tua asuh dan peningkatan kualitas pendidikan.

8. Keterlibatan atau kepedulian masyarakat terhadap organisasi pendidikan yang cenderung semakin menguat harus tetap dipelihara dan dikembangkan, tidak boleh terkontaminasi oleh opini umum tentang menurunnya kualitas dan semakin mahalnya biaya pendidikan.

9. Secara profesional pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan perlu dibina dan ditata kembali secara mendasar agar kehadirannya sebagai pembaharu dan pengembang pendidikan tidak hanya terseret-seret atau ikut-ikutan secara emosional dan tidak rasional. Secara obyektif mereka harus mampu memahami perubahan, serta menempatkannya dalam berbagai kondisi dan tingkat pengelolaan pendidikan.



### 3. Implikasi

#### a. Implikasi Teoritis

- a1. Dicanangkannya wajib belajar pendidikan dasar tingkat SLTP membawa implikasi terhadap tugas dan tanggung jawab para pengelola pendidikan yang semakin berat. Secara struktural mereka harus mampu memerankan tugas-tugas administratif yang semakin berkembang, dan secara fungsional harus mampu mengelola pendidikan dengan bemuara pada perbaikan proses dan hasil belajar.
- a2. Penyelenggaraan wajar pendidikan dasar tingkat SLTP harus menjadi keyakinan (persepsi) dan sikap para pengelola pendidikan yang tidak dipaksakan. Supaya mereka tidak hanya ikut ikutan, terbawa arus, serta tidak rasional dalam menerima perubahan pendidikan.
- a3. Diperlukan pola manajemen pendidikan yang mampu memadukan kebiasaan/budaya lama yang kadang-kadang sulit diubah dengan sistem baru yang dinamis, dalam upaya mencapai efisiensi pengelolaan pendidikan.

a4. Diperlukan kemampuan, dana, sarana dan fasilitas pendidikan, serta pola komunikasi yang memadai untuk terselenggaranya wajar pendidikan dasar tingkat SLTP.

a5. Pendidikan itu berlangsung dalam latar kehidupan suatu masyarakat. Maka dalam pengembangannya pun harus selaras dengan dinamika dan harapan masyarakat terhadap pendidikan.

#### **b. Implikasi Praktis**

b1. Untuk mengoptimalkan partisipasi para pengelola pendidikan, perlu dilakukan upaya kerja sama dengan pihak yang terkait dalam peningkatan pemahaman (persepsi) tentang penyelenggaraan wajar.

b2. Diperlukan upaya praktis untuk menginventarisir dan memilih berbagai bentuk rangsangan atau motivasi yang sesuai dengan karakteristik para pengelola pendidikan, dalam rangka menumbuhkembangkan kesiapan mereka sebagai pengelola pendidikan.

b3. Hal praktis dan penting dalam penyelenggaraan wajar

, adalah lahirnya ide-ide baru dari para pengelola pendidikan dalam menterjemahkan kebijaksanaan dan memberi makna yang tepat, serta mampu menempatkannya pada tingkat sekolah.

34. Pengelola pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan kebijakan baru, adanya kecenderungan untuk tidak menerima atau menolak perubahan, mempertahankan atau enggan meninggalkan kegiatan lama yang sudah terbiasa dilakukan harus segera dihilangkan.

### **c. Implikasi lebih lanjut**

ci. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah suatu inovasi yang besar tapi rumit, karena dalam prakteknya memerlukan banyak waktu dan sumber, melibatkan banyak orang dari berbagai komponen dan tingkatan, yang harus diselaraskan antara kepentingan yang satu dengan lainnya. Semuanya memerlukan upaya strategis yang dapat mempersatukan unsur-unsur tersebut menjadi suatu kekuatan dalam pengelolaan pendidikan.

- c2. Sadar akan kemampuan dan pentingnya peran pengelola (administrator) pendidikan dalam menyongsong tuntutan perubahan kebutuhan pendidikan masyarakat, yang secara aktual belum berarti mampu melaksanakan peran dan tugas seperti yang diharapkan. Maka perlu upaya yang dapat memotivasi para pengelola pendidikan untuk mengaktualisasikan diri melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuannya.
- c3. Selain persepsi dan sikap, diduga masih terdapat unsur psikologis lain (seperti pengalaman kerja, gairah kerja, dll.) yang mempengaruhi partisipasi pengelola pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain dalam rangka mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola pendidikan.
- c4. Penelitian ini baru dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, kiranya akan lebih seksama kalau dilakukan pula melalui pendekatan kualitatif, supaya hasilnya dapat dijadikan bahan perbandingan sekaligus upaya perbaikan sistem pengelolaan pendidikan.